

ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DOMPET DHUAFa DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

*Orphanage's Purse as Community Organization
in the Perspective of Community Empowerment*

Mohammad Mulyadi

*Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI*

Naskah diterima: 15 Juli 2012
Naskah diterbitkan: 22 Desember 2012

Abstract: *Community Empowerment Program is not just the responsibility of the government in tackling social problems in a community. Community Empowerment is also the responsibility of all parts of the nation, including community organizations. This conceptempha sizes empowerment to create a self-sufficient community. Orphanage's Purse (Dompel Dhuafa) is one of many community organizations in Indonesia and now has spent quite alot of community empowerment efforts. Some of them are health care and education to name but a few.*

Keywords: *Empowerment, organizations, community.*

Abstrak: Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi berbagai masalah sosial yang terdapat di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah tanggung jawab segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya adalah organisasi masyarakat. Konsep ini menekankan pada pemberdayaan dengan menciptakan kemandirian masyarakat. Dompel Dhuafa adalah salah satu organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Indonesia dan saat ini telah cukup banyak melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Beberapa diantaranya adalah pelayanan kesehatan masyarakat dan pendidikan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, organisasi, masyarakat.

Pendahuluan

Sejak bergulirnya reformasi, demokrasi menjadi sebuah ideologi yang wajib bagi segenap komponen bangsa. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan kekuasaan pemerintah menjadi tidak lagi dominan. Masyarakat memiliki hak dalam mengambil keputusan yang strategis, mengungkapkan aspirasi yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutan mereka. Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak Organisasi Masyarakat (Ormas) mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan bangsa.

Ormas saat ini tidak lagi memandang pemerintah sebagai kekuatan pengekang bagi kegiatan pergerakan mereka, sebaliknya menganggap pemerintah sebagai mitra yang dapat memberdayakan segenap potensi yang ada di dalam Ormas. Pemerintah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Ormas yang mendukung kebijakan pemerintah.

Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Sehubungan itu, Ormas yang tumbuh dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat. Ormas pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Merujuk pada sejarah dan pengalaman masa lalu, bahwa ide-ide pembangunan dilakukan dengan pendekatan *top-down* atau secara sentralistis dari atas ke bawah. Hal itu mengakibatkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, namun bukan dalam pengertian partisipasi yang sebenarnya. Keikutsertaan tersebut lebih terlihat sebagai bentuk mobilisasi yang direkayasa. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan membuat masyarakat semakin bergantung terhadap input-input dari pemerintah. Masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif, dan tidak inovatif dalam memberikan sumbangan pikiran untuk pembangunan.

Secara politik, dengan pendekatan *top-down* atau sentralistis akan mengakibatkan hak-hak masyarakat terserap ke dalam kepentingan pemerintah, sehingga tidak muncul pemikiran kritis dari masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kesadaran dan kesempatan akan pentingnya ikut serta dalam setiap tahapan pembangunan sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu masalah yang ada sejak dulu hingga sekarang adalah masalah kemiskinan. Penanganan masalah tersebut bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau tugas masyarakat sendiri. Penanggulangan kemiskinan merupakan tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat, serta seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya adalah Ormas.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan seluruh unsur bangsa adalah dengan strategi pemberdayaan masyarakat,

dimana masyarakat miskin menjadi subjek untuk menentukan nasibnya sendiri atau dengan kata lain konsep utamanya adalah memandang inisiatif kreatif rakyat sebagai sumber daya. Sementara pemerintah bersama elemen-elemen masyarakat lainnya dapat berperan sebagai fasilitator, regulator, pendamping, dan stimulator sehingga mereka mampu berkembang.

Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Bagaimana strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat? Salah satu strategi yang dilakukan oleh Ormas Dompot Dhuafa adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) dengan melakukan peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah.

Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat tersebut perlu ada organisasi yang mampu mengelolanya dengan baik. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sangat membutuhkan organisasi yang dapat mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada, baik di masyarakat maupun organisasi yang lahir di masyarakat. Hal ini

juga berlaku pada organisasi-organisasi yang tidak memiliki kepentingan politik atau motif ekonomi yaitu ormas.

Secara konseptual, pemberdayaan atau *empowerment* merupakan sebuah proses perubahan, beberapa ahli yang terangkum dalam Suharto (1997:210-224) mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan, diantaranya:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
3. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).
4. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, memengaruhi kejadian-kejadian, dan lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994).

Kata pemberdayaan (*empowerment*) mengesankan arti adanya sikap mental. Berbagai definisi pemberdayaan di atas tertuju pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan. Adapun kekuatan atau kemampuan yang dimaksud menurut Suharto (2005:58) meliputi:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang serta jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Dikatakan sebagai proses karena pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Demikian halnya menurut Setiana (2005:7) bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang diharapkan adalah yang dapat memosisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek.

Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khambali (2005:8), bahwa hakikat upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, terutama yang pada saat sekarang sedang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang berarti memberdayakan adalah membantu seseorang/masyarakat menemukan kemampuan menuju kemandirian. Yang dimaksud dengan kemandirian di sini adalah suatu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang

bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Beberapa pengertian di atas jika dihubungkan dengan keberadaan organisasi masyarakat, maka merujuk pada pemberdayaan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh Ormas untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi/ komunitas yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik. Tujuan yang diharapkan adalah mereka memiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhinya.

Konsep pemberdayaan dalam wacana kehidupan di masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep kemandirian dan diletakkan pada kemampuan tingkat individu dan sosial. Mc Ardle (1989) dalam Sedarmayanti (2004:17) mengartikan bahwa:

Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsisten melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektifnya diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.

Pendapat tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya, dengan demikian pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Peran Ormas Dompot Dhuafa dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Arah kebijaksanaan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas hidup, dan usia harapan hidup penduduk. Secara implisit arah kebijakan pembangunan kesehatan itu menyatakan bahwa penduduk yang sehat merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan, sehingga peranannya sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Penduduk yang sehat memiliki potensi atau kemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas berarti akan meningkatkan nilai tambah ekonomi atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu peningkatan kualitas kesehatan penduduk memegang peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas kesehatan penduduk dapat optimal jika didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, serta diimbangi tersedianya tenaga medis yang berkualitas dan memadai.

Laporan Bank Dunia menyatakan dengan jelas persoalan yang mendesak selain mengenai kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Dimana Indonesia masih harus menghadapi perjalanan yang panjang dan sulit dalam menjalankan program yang secara drastis akan mengurangi kemiskinan yang bukan disebabkan oleh pendapatan (*non-income poverty*), yaitu: kurangnya gizi pada sekitar seperempat jumlah anak balita; tingginya tingkat kematian karena persalinan (307 kematian pada setiap 100.000 kelahiran); dampak pendidikan tetap rendah (diantara anak umur 16-18 tahun) yang berasal dari lima daerah termiskin, hanya 55% yang menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

akses yang kurang untuk mendapatkan air yang bersih dan aman untuk dikonsumsi (43% di daerah pedesaan, 78% di daerah perkotaan pada lima wilayah terendah).¹ Tantangan bagi pemerintahan saat ini dan yang akan datang adalah bagaimana untuk terus meningkatkan keadaan kesehatan dan memberikan perhatian lebih kepada kondisi kesehatan masyarakat miskin.

Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, bahkan bagi masyarakat miskin dan yang rentan miskin kesehatan menjadi kondisi yang sangat sulit. Kata “Sakit” dan “Masuk Rumah Sakit” menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Selain tidak memiliki biaya, sulit bagi mereka untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang benar-benar bebas biaya dari rumah sakit.

Untuk itu, pada tahun 2001, Dompot Dhuafa mendirikan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) di Ciputat, untuk memberikan akses layanan kesehatan yang layak dan optimal secara gratis bagi kaum dhuafa (masyarakat miskin). Saat ini lebih dari 504.438 kaum dhuafa telah terlayani, baik oleh LKC secara langsung maupun program-program kesehatan yang diselenggarakan di luar gedung LKC. Jumlah anggota LKC sejak tahun 2001 sampai dengan 2011 adalah 16.009 Kepala Keluarga (KK).

Untuk mengimplementasikan visi dan misinya, LKC menjalankan berbagai macam program unggulan yang strategis, efektif, efisien, dan terukur. Hal ini didukung dengan pengelolaan lembaga yang akuntabel dan profesional, serta terfokus pada pelayanan sosial yang bersifat nirlaba. LKC terus tumbuh dan mendapat kepercayaan tinggi dari para donatur.

¹ “*Making The New Indonesia, Work For The Poor*,” World Bank Jakarta, November 2006.

LKC membagi programnya dalam dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah *Direct Program*. Program ini bersifat langsung, dimana aksi yang dilakukan oleh LKC akan dirasakan seketika itu juga oleh para penerima manfaat. Pendekatan yang kedua adalah *Indirect Program*, dimana LKC berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya kepada para penerima manfaat melalui peningkatan *soft skill*. Dari sini diharapkan, kualitas dan profesionalisme pelaksana program (SDM) menjadi lebih baik. Selain itu, dalam *indirect program* tercakup pula pengembangan dan pembangunan fisik sarana kesehatan.

Secara garis besar, berikut penjabaran program kegiatan LKC. Untuk menjaga amanah para donatur, LKC menggunakan sistem keanggotaan, dimana calon pasien mendaftar dan diverifikasi oleh penyurvei. Jika sesuai dengan kriteria dhuafa, maka anggota (*member*) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis selama 1 tahun. Dan dapat diperpanjang 1 tahun kemudian dengan proses survei ulang.

Saat ini LKC melaksanakan 6 Pelayanan Kesehatan yaitu: 1) promotif, 2) preventif, 3) kuratif melalui pengobatan di LKC dan Rumah Sehat Terpadu (RST), 4) rehabilitatif, 5) advokasi, dan 6) kemitraan. Salah satu contoh yang sudah dilakukan adalah dalam kasus Gizi Buruk di daerah Banten dan kampanye pentingnya Air Susu Ibu (ASI) dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.

Program-program LKC secara detail adalah sebagai berikut :

1. Klinik LKC 24 jam/LKC Cabang/ Gerai Sehat, terdiri dari layanan rawat jalan, rawat inap, dan persalinan normal;
2. Penunjang Medis, terdiri dari laboratorium, radiologi dan fisioterapi;

3. Rujukan pasien ke RS yang memiliki fasilitas lengkap;
4. Aksi Layan Sehat, berupa pelayanan kesehatan keliling yang menjangkau pasien-pasien di daerah miskin, kumuh, karena akses pelayanan kesehatan yang sulit terjangkau;
5. Khitanan Massal yang dilakukan untuk anak-anak usia sekolah, terutama pada liburan sekolah. Cakupan Wilayah: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
6. Pos Sehat, yaitu layanan kesehatan berbasis masjid melalui pemberdayaan masyarakat sebagai kader dengan praktik seminggu 2 kali, durasi 2-3 jam bertujuan untuk membantu masyarakat dhuafa sekitarnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis. LKC mempunyai 28 Pos Sehat Mitra yang tersebar di 4 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY), dengan masing-masing Pos Sehat mempunyai anggota 250 KK = 1.250 Jiwa.
7. Sigap Bencana, yaitu pelayanan kesehatan di daerah bencana seperti pada peristiwa tsunami Aceh, gempa DIY, tsunami Mentawai, gempa Padang, bencana Gunung Merapi DIY, bencana Wasior Papua, bencana Gunung Sinabung Sumatera Utara, dan lain lain;
8. *Tuberculosis (TB) Center*, yakni pelayanan pasien TB menggunakan strategi DOTS. Jumlah kunjungan dari bulan Agustus 2010–Mei 2011 sebanyak 1702 pasien dengan angka kesembuhan mencapai 80%;
9. *Positive Deviance*, yaitu sebuah program inovasi yang bertujuan untuk merehabilitasi balita gizi kurang menggunakan kekuatan dan sumber daya lokal;

10. *Diabetes Melitus (DM) Center*, yaitu pelayanan DM secara holistik, mulai dari pemeriksaan gula darah rutin, pengobatan, terapi gizi medik, olahraga (senam dan senam kaki), edukasi pasien. *DM Center* buka setiap hari Selasa dan Kamis (Senam DM: 2 kali sebulan, Senam Kaki & penyuluhan: seminggu sekali);
11. *Pojok Laktasi*, yaitu pelayanan terpadu meliputi kegiatan konseling menyusui, dari prapersalinan sampai usia 2 tahun, pendidikan dan pelatihan (diklat) manajemen laktasi, perawatan bayi berat lahir rendah dengan metode kanguru dan membentuk komunitas pendukung ASI di masyarakat;
12. *Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)*, yaitu pendidikan dan pelatihan kesehatan gigi di sekolah-sekolah Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Tsanawiyah (MT). Untuk sementara ini baru dilakukan di wilayah Tangerang Selatan dan Bogor;
13. *Promotif dan preventif* berupa penyuluhan seputar materi tentang: TB, Hipertensi, Kencing manis/DM, ASI, demam berdarah, pola hidup bersih dan sehat.

Dalam perjalanannya, di tahun 2007, Dompot Dhuafa bekerjasama dengan Masjid Agung Sunda Kelapa mendirikan Rumah Sehat Sunda Kelapa, dan sampai dengan sekarang tercatat 200.000 kaum dhuafa telah mendapatkan layanan secara cuma-cuma. Dan untuk lebih meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada kaum dhuafa, Dompot Dhuafa di tahun 2011 mendirikan RST Zona Madina. RST ini berada di atas lahan wakaf seluas 7.803 m² di Desa Jampang Kecamatan Kemang, Bogor Jawa Barat. RST mengandung pengertian rumah yang

memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan mengutamakan suasana lingkungan sehat, nuansa Islami dan mengoptimalkan doa untuk kesembuhan para pasiennya.

Layanan yang diberikan kepada pasien adalah dengan pendekatan kehangatan keluarga, kecepatan layanan, kecepatan profesional dengan sentuhan hati. Dari sini diharapkan lahir model layanan kesehatan yang semua dananya dibiayai oleh dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf. Tujuan utama pembangunan RST adalah meningkatkan jumlah pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, mengintegrasikan seluruh layanan kesehatan ke dalam satu manajemen RST, mengurangi biaya rujukan pasien ke RS milik pemerintah, serta membangun paradigma pelayanan kesehatan profesional nonprofit.

Kebutuhan dana pembangunan RST yang mencapai kurang lebih Rp25 miliar diharapkan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan potensi wakaf masyarakat baik individu maupun kelembagaan. Ini saatnya Dompot Dhuafa kembali membuktikan bahwa zakat dan wakaf dapat dijadikan instrumen dalam mengurangi kemiskinan, serta melakukan transformasi gerakan sosial menuju pengelolaan wakaf yang profesional.

Peran Ormas Dompot Dhuafa dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Negara Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, maka untuk memenuhi amanat tersebut pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan, dalam rangka memenuhi hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Disadari sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Pendidikan yang berkualitas dapat mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang modern, maju, makmur, dan sejahtera, yang tercermin pada keunggulan dan kemampuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk itu, pemerintah telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena memberi kontribusi signifikan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat.

Untuk meningkatkan pembangunan suatu bangsa diperlukan sebuah program yang terencana di bidang pendidikan. Hal ini membutuhkan adanya persentase penduduk dengan tingkat pendidikan yang memadai untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang cepat. Program pendidikan dasar sembilan tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan program itu, serta membekali anak didik dengan keterampilan dan pengetahuan dasar untuk dapat: melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; menjadi bekal menjalani kehidupan dalam masyarakat; membuat pilihan-pilihan dan memanfaatkan produk-produk berteknologi tinggi; serta mengadakan interaksi.

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah telah berupaya memberi layanan pendidikan bagi segenap anak bangsa, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia, termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Selama ini, pembangunan pendidikan nasional telah menunjukkan hasil positif yang

terlihat dari pencapaian angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang. Namun realitas pendidikan di beberapa daerah tertinggal seperti Papua masih menunjukkan kecenderungan bertambahnya angka penduduk buta huruf (Sumber: BPS-RI, Susenas 2003-2010).

Berdasarkan realita yang ada, maka saat ini dibutuhkan segenap komponen bangsa untuk ikut peduli terhadap kondisi pendidikan yang cukup tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga lainnya. Saat ini Dompot Dhuafa sedang melakukan program mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan sejak usia dini, terutama untuk menyiapkan setiap anak agar dapat menempuh pendidikan dasar secara lebih baik. Program pengembangan anak-anak usia dini dilakukan melalui lembaga pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), misalnya: Taman Kanak-kanak (TK), *Raudhatul Athfal*, *Bustanul Athfal*, TK Al-Qur'an, Tempat Penitipan Anak (TPA), dan kelompok bermain. Peran lembaga PAUD ini sangat strategis, karena menurut berbagai studi, anak-anak yang mengikuti PAUD berpotensi untuk mencapai prestasi lebih tinggi pada jenjang pendidikan dasar.

Pada pendidikan dasar, keberhasilan program pendidikan terutama program wajib belajar enam tahun dan sembilan tahun secara umum dapat dievaluasi dari perkembangan jumlah murid ditingkat SD dan SMP. Selain itu Dompot Dhuafa bersama Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) juga menggagas kerjasama program "Donasi Anak Indonesia," yang bertujuan untuk menggalang dana bagi anak-anak kurang mampu yang rawan putus sekolah di Indonesia.

Program Donasi Anak Indonesia merupakan kolaborasi program

penggalangan dana untuk membantu pendidikan anak-anak Indonesia, di mana terdapat 1 juta lebih anak yang rawan putus sekolah. Program Donasi Anak Indonesia memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah anak-anak rawan putus sekolah yang tersebar di seluruh wilayah pelosok mulai dari daerah kumuh perkotaan, desa, kaki pegunungan, daerah tepi pantai, dan pulau-pulau terpencil. Untuk itu, Dompot Dhuafa bersama GNOTA mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program ini dengan menyisihkan sebagian hartanya demi mewujudkan cita-cita anak bangsa yang saat ini tidak bisa sekolah karena keterbatasan biaya. Donasi yang dihimpun ini nantinya akan disalurkan untuk berbagai program pendidikan anak-anak Indonesia seperti: pengadaan alat belajar, bantuan sekolah, pendampingan, pelatihan guru di daerah terpencil, dan lain-lain.

Di tingkat perguruan tinggi, Divisi Pendidikan Dompot Dhuafa mengusahakan agar pemuda sebagai elemen kebangkitan bangsa dapat mengikuti pendidikan tinggi dengan baik. Karenanya pendidikan pemuda dan mahasiswa harus memperoleh perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Divisi Pendidikan Dompot Dhuafa berkhidmat pada peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan. Berbagai pengalaman dalam mengelola beasiswa investasi SDM plus pemberdayaan, mengantarkannya untuk memperhatikan para aktivis mahasiswa yang penuh dengan semangat, idealisme, dan potensi untuk perbaikan suatu bangsa.

Padatnya aktivitas akademis dan nonakademis, ditambah dengan rongrongan untuk lebih realistis, membuat aktivis cenderung untuk tidak seimbang dan tergadai idealismenya. Padahal idealisme tersebut yang membuat mereka

terus berjuang, berkontribusi, dan menebar kemanfaatannya. Bangsa Indonesia, ke depannya membutuhkan pemimpin yang berani, cerdas, aktif, dan punya integritas untuk melayani masyarakat. Sesungguhnya para aktivis mahasiswa memiliki semua modalnya, tinggal bagaimana sistem dapat mendukungnya. Beasiswa Aktivis pun bersumbangsih untuk mendukung lahirnya pemimpin masa depan yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan terus berupaya untuk berkontribusi menjadi solusi bagi kompleksnya problem bangsa. Beasiswa Aktivis merupakan investasi SDM yang dipersiapkan untuk mengelola biaya pendidikan, pembinaan, dan pelatihan, serta pendampingan bagi aktivis mahasiswa.

Simpulan

Banyak Ormas yang melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, namun masih belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Ormas yang ada saat ini cenderung tidak mengakar dan tidak representatif. Di samping itu, ditengarai pula bahwa dalam beberapa hal, Ormas lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar masyarakat atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya.

Kondisi Ormas yang tidak mengakar, tidak representatif, dan tidak dapat dipercaya tersebut, pada umumnya tumbuh subur dalam situasi perilaku/sikap masyarakat yang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, pada akhirnya mendorong sikap skeptisme, masa

bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran.

Peran Ormas dibutuhkan dalam membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum ekonomi lemah yang mandiri, serta berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Selain itu juga mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin (*pro poor*) dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Gambaran Ormas seperti dimaksud di atas hanya akan tercapai jika orang-orang yang terlibat dalam kepengurusan Ormas merupakan kumpulan dari orang-orang yang peduli, memiliki komitmen kuat, ikhlas, jujur, dan rela berkorban, untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena upaya-upaya membangun kepedulian, kerelawanan, dan komitmen, pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan perilaku masyarakat.

Kurangnya akses layanan kesehatan dan asuransi yang dapat membantu menutupi biaya pelayanan kesehatan, memengaruhi kemampuan dari banyak individu dengan pendapatan rendah untuk menjaga kesehatan mereka. Kondisi kehidupan sehari-hari dari kaum dhuafa, misalnya keberadaan mereka dalam lingkungan yang berbahaya dan kondisi pekerjaan (contohnya, kekerasan lingkungan dan polusi) atau resiko

pemecatan, pekerjaan yang penuh tekanan tetapi hanya menawarkan sedikit imbalan, juga membawa dampak bagi kesehatan mereka.

Rendahnya tingkat kualitas hidup akibat minimnya fasilitas dasar, buruknya mutu SDM, etos kerja yang lemah dan sulit berkembang, terbatasnya kemampuan mencari pekerjaan yang layak, rendahnya kemampuan menabung, sulitnya mengakses sumber-sumber permodalan, adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat miskin dan tertinggal. Masalah-masalah tersebut merupakan sebuah hubungan sebab dan akibat yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, jika ingin sebuah perubahan ke arah yang lebih baik maka diperlukan peran dari pihak eksternal untuk membuka lingkaran tersebut. Dorongan perubahan yang datang dari pihak eksternal berfungsi untuk memutuskan "rantai kemiskinan" sehingga membentuk siklus baru yang lebih baik. Keterlibatan pihak eksternal bersifat menstimulasi berbagai faktor kunci yang penting dan strategis, agar bergerak lebih cepat dan terarah dalam melakukan proses perubahan.

Saran

Ormas memegang peran penting dan strategis dalam melakukan pemberdayaan (*empowering*), untuk meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat miskin dan tertinggal dalam mengorganisir diri. Tujuan yang ingin dicapai adalah masyarakat secara mandiri mampu melaksanakan program peningkatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan hidup. Pola pemberdayaan masyarakat yang terkonsep, sistematis, terukur, dan tepat sasaran merupakan upaya yang tepat dan efektif mendorong kemandirian masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Inisiatif dan keterlibatan dari Ormas yang memiliki kemampuan, pengetahuan, akses terhadap sumber-sumber informasi, dan pendanaan, merupakan upaya terobosan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketertinggalan. Selain itu juga dapat mendorong kemampuan masyarakat agar tidak mengalami ketergantungan pada pemerintah dan pihak lain dalam menentukan perencanaan hidupnya. Komitmen dan semangat kebersamaan tersebut saat ini dapat dilakukan melalui berbagai program pengembangan masyarakat (*community development*), yang merupakan kerja sama pemerintah dengan Ormas-ormas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2000. *Dokumen Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural*. Jakarta.
- Hadiwiguno, Soetatwo, Agus Pakpahan. 1995. *Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia*. Jakarta: Prisma.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2005. *Buku panduan "Kebijakan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan"*. Jakarta.
- Korten, David C. 2001. *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela Dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyo, Sumedi Andono. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Bappenas.
- Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sriharini. 2007. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Suhartini, Rr., A. Halim, Imam Khambali, Abd. Basyid. 2005. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2003. *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia Agenda Kini dan ke Depan*. Jakarta: Bappenas.
- Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1993. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

